

BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan serta analisa yang telah dilakukan dalam penelitian ini, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut, kehadiran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) merupakan hal yang penting dalam rangka rekonsiliasi dan penguatan perdamaian di Aceh.

1. KKR Aceh mampu berperan dengan menangani dan memulihkan korban konflik di Aceh yang bisa berdampak pada proses rekonsiliasi konflik yang berkepanjangan di Aceh. Karena pada dasarnya para korban hanya ingin pemerintah mengetahui mereka adalah korban, dan bagaimana pemerintah menangani mereka. Kehadiran KKR juga bisa menjadi contoh, karena Indonesia dikenal dengan negara yang kerap di landa konflik, baik itu konflik etnis maupun konflik agama. Banyak konflik-konflik tersebut meninggalkan luka dan trauma yang mendalam bagi para korban, dan kerap kali penanganan mereka terabaikan. Untuk mengakomodasi keinginan tersebut pemerintah sudah beberapa kali berkeinginan mengaktifkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) nasional. Namun pada prosesnya pembentukan KKR nasional tersebut terhalang oleh regulasi.
2. Peran Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi (KKR) Aceh dalam membangun *Positive Peace* menurut teori Johan Galtung, diantaranya adalah dengan adanya keinginan menciptakan keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi hingga keterwakilan politik. Kehadiran KKR merupakan proses mewujudkan hal tersebut dengan faktor pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi kemudian KKR Aceh juga mengeluarkan rekomendasi yang akan diintegrasikan dengan proses pembangunan di Aceh sehingga kesejahteraan rakyat Aceh akan lebih terjamin. Setelah terciptanya perjanjian damai di Aceh tidak serta merta membawa perdamaian yang positif. Dibutuhkan

rekonsiliasi secara terus menerus, salah satunya dengan kehadiran KKR Aceh. Karena sejatinya konflik dan kekerasan melahirkan pelanggaran-pelanggaran yang membutuhkan penanganan yang lebih lanjut. KKR Aceh lahir berdasarkan nilai-nilai budaya yang sesuai dengan kebudayaan Aceh. Hal ini akan berdampak terhadap terwujudnya *Positive Peace* di Aceh. Lebih lanjut KKR Aceh dapat menjadi *role of model* bagi pembentukan KKR nasional dan menjadi contoh untuk penyelesaian kasus-kasus serupa nantinya. Karena sejatinya, KKR terbentuk bertujuan menstimulasi segenap energi bangsa untuk berfikir secara holistik dan futuristik, dimana setiap permasalahan yang dihadapi harus dicarikan solusi bijak bukan malah menunda-nunda untuk diselesaikan

5.2 Rekomendasi

Permasalahan penanganan pasca konflik merupakan hal yang wajib di tangani dengan serius karena selama ini kerap luput dari perhatian, padahal penanganan pasca konflik khususnya korban konflik dapat memperkuat perdamaian itu sendiri. Dari penelitian ini dapat direkomendasikan beberapa poin, yaitu:

1. Pemerintah direkomendasikan untuk menggunakan lembaga yang bergerak secara independen seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk menangani konflik-konflik yang terjadi di Indonesia.
2. kehadiran KKR efektif dalam rangka penguatan perdamaian di Aceh. Untuk mengoptimalkan kinerja KKR, pengambil kebijakan harusnya memberikan porsi yang lebih untuk KKR dalam berperan. Karena selama ini KKR masih di pandang sebelah mata dengan keterbatasan, seperti anggaran yang dirasa kurang sehingga beberapa kali kerja KKR jadi tersendat.

3. Peran KKR dalam rangka membangun *positive peace* seharusnya lebih dikedepankan, sebagai eksekutor bukan hanya sebatas mengeluarkan rekomendasi.
4. Pemerintah juga harus berperan aktif dalam mengintegrasikan rekomendasi yang dikeluarkan KKR dengan rancangan pembangunan pemerintah nantinya. Proses *peace building* di Aceh sendiri masih akan berlangsung, dibutuhkan kesiapan semua pihak untuk mewujudkannya, sehingga *positive peace* di Aceh merupakan hal yang bisa di capai
5. Konflik di Aceh bermuara pada ketidaksejahteraan, rekomendasi untuk pemerintah daerah yang telah diberikasn kewenangan dan anggaran yang besar dalam mengatur daerah Aceh sendiri disamping melakukan penguatan perdamaian harus lebih memperhatikan kesejahteraan rakyat Aceh sehingga konflik bisa dihindarkan di masa depan.